

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan mediasi Liga Arab dalam konflik Yaman periode 2015 hingga 2024 menggunakan kerangka resolusi konflik Peter Wallensteen yang mengidentifikasi tiga elemen keberhasilan resolusi konflik: penghentian kekerasan, penerimaan eksistensi, dan kesepakatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam Bab II dan Bab III, penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi Liga Arab gagal mendorong tercapainya ketiga elemen resolusi konflik secara bersamaan. Kegagalan ini bukan bersifat kebetulan atau semata-mata karena kompleksitas konflik Yaman itu sendiri, melainkan berakar pada satu permasalahan struktural yang mendasar: Liga Arab sebagai institusi tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai mediator yang netral, independen, dan inklusif karena anggota dominannya merupakan pihak yang secara aktif terlibat dalam konflik yang ingin dimediasi.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana kegagalan mediasi Liga Arab dalam konflik Yaman periode 2015 hingga 2024, dijawab melalui evaluasi terhadap ketiga elemen resolusi konflik Wallensteen secara berurutan. Berikut adalah kesimpulan untuk masing-masing elemen. Pertama, pada elemen penghentian kekerasan, mediasi Liga Arab gagal menghasilkan penghentian kekerasan yang berkelanjutan. Satu-satunya inisiatif yang secara langsung dipimpin Liga Arab sebagai institusi, yaitu KTT Sharm el-Sheikh 2015 dan gencatan senjata kemanusiaan Mei 2015, tidak menghasilkan perubahan substantif dalam dinamika

kekerasan di lapangan. Inisiatif-inisiatif ini bersifat politis dan teknis tanpa mekanisme verifikasi independen yang memadai, serta tidak menyentuh akar permasalahan yang melatarbelakangi kekerasan. Kontras yang sangat tajam terlihat ketika dibandingkan dengan gencatan senjata nasional PBB 2022 yang berhasil menghasilkan penurunan kekerasan hingga 90 persen dalam dua bulan pertama pelaksanaannya karena dipimpin oleh mediator yang netral dan didukung mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur. Empat aspek kegagalan yang saling memperkuat diidentifikasi pada elemen ini: absennya mekanisme penegakan yang efektif, konflik kepentingan struktural yang inheren dalam posisi Liga Arab, kondisi kematangan konflik yang belum tercapai, dan eksklusivitas proses yang secara konsisten mengeluarkan Houthi dari meja perundingan.

Kedua, pada elemen penerimaan eksistensi, mediasi Liga Arab gagal mendorong terbentuknya pengakuan mutual antara pihak-pihak yang berkonflik. Sejak KTT Sharm el-Sheikh 2015, Liga Arab secara konsisten mengakui IRG sebagai satu-satunya otoritas yang sah dan menolak memperlakukan Houthi sebagai aktor yang memiliki legitimasi politik. Framing zero-sum yang dikonstruksi dalam KTT 2015 menjadi template yang terus direplikasi dalam seluruh resolusi dan pernyataan Liga Arab sepanjang 2015 hingga 2024. Akibatnya, Houthi tidak pernah diperlakukan sebagai mitra dialog yang setara dalam forum apapun yang dipimpin Liga Arab, sehingga menutup rapat setiap kemungkinan terbentuknya penerimaan eksistensi yang mutual. Kemajuan penerimaan eksistensi yang paling nyata, yaitu keterlibatan langsung Houthi dalam perundingan Kuwait 2016, Stockholm 2018, dan gencatan senjata nasional PBB 2022, semuanya dicapai oleh PBB tanpa

keterlibatan Liga Arab. Bahkan dialog bilateral Arab Saudi dan Houthi yang dimediasi Oman pada 2022 hingga 2024 yang merupakan bentuk pengakuan paling substantif atas eksistensi Houthi berlangsung sepenuhnya di luar kerangka Liga Arab, menunjukkan bahwa kemajuan penerimaan eksistensi hanya dapat terjadi ketika Liga Arab tidak memegang kendali prosesnya.

Ketiga, pada elemen kesepakatan, tidak ada satu pun kesepakatan yang dipimpin atau difasilitasi Liga Arab sebagai institusi yang memenuhi ketiga kriteria Wallensteen, yaitu menyentuh substansi konflik, melibatkan seluruh aktor kunci, dan dilengkapi mekanisme implementasi yang efektif. Deklarasi KTT 2015 mendapatkan penilaian gagal pada seluruh kriteria karena bersifat deklaratif, tidak melibatkan Houthi, dan tidak memiliki mekanisme implementasi. Perjanjian Riyadh 2019, meskipun difasilitasi oleh anggota Liga Arab, bukan merupakan produk institusional Liga Arab dan juga mendapatkan penilaian gagal pada seluruh kriteria karena tidak menyentuh konflik utama IRG-Houthi dan mengalami kemacetan implementasi. Satu-satunya kesepakatan yang memenuhi ketiga kriteria Wallensteen adalah gencatan senjata nasional PBB 2022 yang sepenuhnya dipimpin oleh PBB. Fakta ini merupakan bukti empiris paling kuat bahwa keterbatasan mediasi Liga Arab bukan disebabkan oleh kerumitan konflik Yaman semata, melainkan oleh ketidakmampuan struktural Liga Arab untuk memenuhi prasyarat-prasyarat kesepakatan yang substantif.

Berdasarkan evaluasi terhadap ketiga elemen resolusi konflik Wallensteen di atas, sintesis keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan mediasi Liga Arab dalam konflik Yaman bersifat sistemik dan saling berkaitan. Kegagalan

pada elemen penerimaan eksistensi menyebabkan tidak adanya proses inklusif yang memungkinkan terbentuknya kesepakatan yang bermakna. Kegagalan pada elemen kesepakatan menyebabkan tidak adanya landasan yang kuat bagi penghentian kekerasan yang berkelanjutan. Dan kegagalan pada elemen penghentian kekerasan memperparah ketidakpercayaan antarpihak yang semakin mempersulit terbentuknya penerimaan eksistensi. Ketiga elemen bekerja dalam satu lingkaran yang saling melemahkan karena berakar pada satu permasalahan struktural yang sama: Arab Saudi sebagai anggota dominan Liga Arab sekaligus pemimpin koalisi militer yang aktif berperang melawan Houthi menjadikan Liga Arab secara inheren tidak dapat bertindak sebagai mediator yang netral, independen, dan dipercaya oleh semua pihak. Selama kondisi struktural ini tidak berubah, Liga Arab tidak akan mampu memimpin proses resolusi konflik yang menghasilkan ketiga elemen Wallensteen secara bersamaan. Pernyataan Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Januari 2025 yang hanya memosisikan Liga Arab sebagai mitra pendukung proses yang dipimpin PBB merupakan pengakuan implisit atas marginalisasi struktural ini (United Nations Security Council, 2025).

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan baik untuk kepentingan kebijakan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Pertama, bagi Liga Arab sebagai institusi, reformasi mekanisme internal yang memisahkan peran keanggotaan dari peran mediasi perlu dipertimbangkan

secara serius. Selama negara-negara anggota yang menjadi pihak dalam konflik dapat secara bersamaan menentukan posisi institusional Liga Arab, konflik kepentingan struktural yang diidentifikasi dalam penelitian ini akan terus menghambat efektivitas mediasi. Model yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan badan mediasi yang independen secara operasional dari Dewan Liga Arab, dengan panel mediator yang dipilih berdasarkan kriteria netralitas dan kompetensi, bukan representasi negara anggota. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan oleh beberapa organisasi regional lainnya dan dapat diadaptasi sesuai konteks Timur Tengah.

Kedua, bagi PBB dan komunitas internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa PBB secara konsisten menghasilkan inisiatif yang lebih mendekati kriteria resolusi konflik Wallensteen dibandingkan Liga Arab. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan mandat Utusan Khusus PBB untuk Yaman perlu menjadi prioritas, termasuk pemberian wewenang yang lebih kuat untuk mekanisme verifikasi dan penegakan gencatan senjata yang disepakati. Selain itu, dialog bilateral yang dimediasi Oman antara Arab Saudi dan Houthi menunjukkan bahwa jalur bilateral dapat menghasilkan de-eskalasi yang bermakna. Dukungan internasional terhadap jalur ini perlu ditingkatkan agar tidak hanya menghasilkan de-eskalasi ekonomi parsial, melainkan juga kemajuan yang lebih substantif pada akar permasalahan konflik.

Ketiga, bagi Pemerintah Yaman dan pihak-pihak yang berkonflik, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kesepakatan yang dihasilkan sepanjang 2015 hingga 2024 yang memenuhi seluruh kriteria Wallensteen secara bersamaan.

Kondisi ini berarti bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan belum tercapai dan masih membutuhkan komitmen yang jauh lebih dalam dari semua pihak. Dalam konteks ini, Houthi perlu diakui sebagai aktor yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses dialog yang bertujuan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan, sementara IRG dan STC perlu diakomodasi dalam kerangka yang mempertimbangkan kepentingan keamanan mereka secara setara.

Keempat, bagi peneliti dan akademisi yang tertarik mengembangkan kajian ini lebih lanjut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan kerangka Wallensteen sebagai satu-satunya alat analisis; penelitian lanjutan dapat memperkaya analisis dengan memadukan kerangka Wallensteen dengan teori ripeness Zartman atau teori spoiler management untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika mediasi di Yaman. Kedua, penelitian ini tidak mencakup perspektif langsung dari aktor-aktor yang terlibat karena keterbatasan akses; penelitian lapangan atau wawancara mendalam dengan diplomat, pejabat PBB, dan aktor Yaman yang relevan akan memberikan dimensi analisis yang lebih kaya. Ketiga, perkembangan konflik Yaman setelah periode kajian, termasuk dampak serangan Houthi di Laut Merah sejak November 2023 dan respons militer Amerika Serikat serta Inggris, membuka babak baru yang belum tercakup dalam penelitian ini dan layak menjadi fokus penelitian tersendiri